

KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH

DALAM MEMBANGUN ACEH
ISLAMI DAN SEJAHTERA



Dr. Bustami, S.IP., M.Sos

KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN ACEH ISLAMI DAN SEJAHTERA

Penulis:

Dr. Bustami, S.IP., M.Sos



KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH

DALAM MEMBANGUN ACEH ISLAMI DAN SEJAHTERA

Copyright © PT Penamuda Media, 2025

Penulis:

Dr. Bustami, S.IP., M.Sos

ISBN: 978-634-7431-85-1

Penyunting dan Penata Letak:

Tim PT Penamuda Media

Desain Sampul:

Tim PT Penamuda Media

Penerbit:

PT Penamuda Media

Redaksi:

Casa Sidoarum RT03 Ngentak, Sidoarum Godean Sleman Yogyakarta

Web: www.penamudamedia.com

E-mail: penamudamedia@gmail.com

Instagram: [@penamudamedia](https://www.instagram.com/penamudamedia)

WhatsApp: +6285700592256

Cetakan Pertama, Februari 2026

xiv + 367 halaman; 15 x 23 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit maupun penulis



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul **"Komunikasi Politik Pemerintah dalam Membangun Aceh Islami dan Sejahtera"** ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Aceh, sebagai serambi Mekah Indonesia, memiliki keunikan tersendiri dalam konstelasi ketatanegaraan Indonesia. Dengan status otonomi khusus yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, daerah ini memiliki kewenangan istimewa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Keistimewaan ini menempatkan Aceh pada posisi unik yang memerlukan pendekatan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam aspek komunikasi politik.

Komunikasi politik memegang peranan vital dalam mewujudkan visi Aceh sebagai daerah yang Islami dan sejahtera. Tanpa komunikasi politik yang efektif, setiap kebijakan, program pembangunan, dan aspirasi masyarakat akan sulit untuk diartikulasikan, dipahami, dan diwujudkan. Komunikasi politik bukan sekadar penyampaian informasi dari pemerintah kepada rakyat, tetapi merupakan proses dialogis yang melibatkan berbagai stakeholder, mulai dari pemerintah, legislatif, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, hingga masyarakat luas.



Buku ini hadir dengan tujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana komunikasi politik pemerintah Aceh dijalankan dalam upaya mewujudkan cita-cita Aceh yang Islami dan sejahtera. Pembahasan dalam buku ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga menghadirkan analisis praktis tentang strategi komunikasi politik yang telah dan sedang diimplementasikan, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Pentingnya pembahasan mengenai komunikasi politik di Aceh tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang daerah ini. Pasca konflik yang berlangsung puluhan tahun, Aceh membutuhkan rekonstruksi tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara sosial dan politik. Kesepakatan damai Helsinki pada tahun 2005 membuka babak baru bagi Aceh untuk membangun dirinya dengan tetap mempertahankan identitas keislaman yang kuat. Dalam konteks inilah, komunikasi politik menjadi instrumen penting untuk membangun konsensus, mengelola perbedaan, dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Membangun Aceh yang Islami bukan berarti hanya menerapkan aspek formalistik syariat Islam, tetapi lebih jauh adalah mewujudkan nilai-nilai substantif Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, transparansi, partisipasi, dan kesejahteraan bersama harus menjadi roh dari setiap kebijakan dan program pemerintah. Sementara itu, Aceh yang sejahtera adalah Aceh yang mampu memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi seluruh warganya, di mana pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan.

Dalam mewujudkan kedua pilar tersebut, pemerintah Aceh menghadapi berbagai tantangan kompleks. Mulai dari



tantangan internal seperti kapasitas aparatur, koordinasi antar lembaga, hingga tantangan eksternal seperti dinamika politik nasional dan global. Di sinilah peran komunikasi politik menjadi krusial. Komunikasi politik yang baik akan membantu pemerintah dalam mengelola ekspektasi publik, membangun kepercayaan, menggalang dukungan, dan menghadapi resistensi terhadap kebijakan.

Buku ini disusun berdasarkan kajian mendalam terhadap literatur komunikasi politik, studi kasus implementasi kebijakan di Aceh, serta wawancara dengan berbagai narasumber yang kompeten. Kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana akademik tentang komunikasi politik, sekaligus menjadi referensi praktis bagi para pembuat kebijakan, praktisi komunikasi politik, aktivis, dan siapa saja yang peduli terhadap pembangunan Aceh.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Aceh khususnya, dan pembangunan Indonesia pada umumnya, dan semoga Allah SWT meridhai semua usaha kita dalam membangun Aceh yang Islami dan sejahtera.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 01 Februari 2026

Penulis

Dr. BUSTAMI, S.IP., M.Sos



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
BAB 1 ACEH PASCA-MOU HELSINKI.....	1
A. Transformasi Politik Aceh Pasca-Perdamaian.....	1
B. Kontribusi Terhadap Syariat Islam.....	11
C. Aktor Komunikasi Politik.....	13
D. Isu Spesifik.....	15
BAB 2 KOMUNIKASI POLITIK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN.....	19
A. Komunikasi Politik Pemerintah.....	19
B. Dinamika Relasi Komunikasi.....	33
C. Efektivitas Komunikasi.....	39
D. Prinsip Dasar Komunikasi Islam.....	48
E. Integrasi Agama dan Pembangunan.....	58
BAB 3 HISTORIOGRAFI ACEH.....	65
A. Sejarah Provinsi Aceh.....	65
B. Sejarah Awal dan Masuknya Islam.....	67
C. Masa Kejayaan Kesultanan Aceh.....	68
D. Perlawanan Terhadap Kolonialisme.....	69
E. Era Kemerdekaan dan Integrasi dengan Indonesia.....	70
F. Konflik dan Gerakan Aceh Merdeka.....	71
G. Tsunami 2004 Tragedi yang Mengubah Sejarah.....	73
H. Perjanjian Damai Helsinki.....	74
I. Aceh Modern dan Otonomi Khusus.....	75
J. Warisan Budaya dan Peradaban.....	76
BAB 4 MENINGTEGRASIKAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN ACEH.....	79
A. Komunikasi Politik Pemerintah Aceh.....	79



B.	Model Strategi Komunikasi Politik yang Efektif.....	106
C.	Komunikasi Politik Berbasis Masjid	108
D.	Komunikasi Politik Pemerintah	111
E.	Syariat Islam	113
F.	Pembangunan	115
G.	Masyarakat	117
BAB 5 SEGITIGA KEKUASAAN DINAMIKA KOMUNIKASI		
	PEMERINTAH, ULAMA, DAN BIROKRASI	123
A.	Komunikasi Politik Pemerintah, Ulama, dan Birokrasi...	123
B.	Pemerintah, Ulama, dan Birokrasi.....	146
C.	Komunikasi, Kebijakan, Pembangunan	148
D.	Koordinasi, Harmonis, Dialogis	149
BAB 6 KOMUNIKASI POLITIK DALAM MENSOSIALISASIKAN		
	PEMBANGUNAN BERBASIS SYARIAT	157
A.	Komunikasi Politik Pemerintah Aceh dalam Mensosialisasikan Program Pembangunan Berbasis Nilai- Nilai Keislaman.....	157
B.	Komunikasi, Politik, Pemerintah, Masyarakat	184
C.	Pembangunan, Kebijakan, Program	186
D.	Nilai Islam & Syariat	188
E.	Efektivitas dan Pesan	189
BAB 7 MODEL KOMUNIKASI POLITIK INTEGRATIF.....		
	198	
A.	Komunikasi Politik Pemerintah Aceh.....	198
B.	Komunikasi Politik dalam Konteks Aceh	205
C.	Komunikasi Informal dalam Struktur Kelembagaan	209
D.	Model Komunikasi Antarlembaga	212
E.	Komunikasi Strategis dalam Konteks Otonomi Khusus..	214
F.	Peran Komunikasi dengan Pemerintah Daerah	216
BAB 8 KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH DALAM		
	MENGINTEGRASIKAN SYARIAT DAN PEMBANGUNAN.....	218



A.	Dimensi Kultural dan Keislaman dalam Komunikasi	218
B.	Manajemen Dakwah sebagai Strategi Komunikasi.....	221
C.	Strategi Komunikasi Politik Pemerintah Aceh yang Cenderung Menonjolkan Penegakan Hukum Syariat.....	223
D.	Komunikasi Politik Pemerintah Aceh dalam Kerangka Otonomi Khusus.....	226
BAB 9 MODEL KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH ACEH		229
A.	Model Partisipatif.....	229
B.	Model Edukatif.....	230
C.	Model Transformatif.....	230
D.	Masjid sebagai Jantung Komunikasi Politik dan Sosial di Aceh.....	231
BAB 10 PARADIGMA BARU KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DI ACEH		233
A.	Paradigma Komunikasi yang Transformatif.....	233
B.	Peran Strategis Ulama sebagai Aktor Epistemik.....	236
C.	Sinergi Tripartit dalam Pembangunan Syariah.....	239
D.	Pola Komunikasi Resiprokal dan Saling Mendukung.....	240
E.	Komunikasi Politik Kolaboratif.....	241
F.	Peran Simbolik dan Substantif dalam Komunikasi Politik.....	243
BAB 11 DIALEKTIKA KOMUNIKASI POLITIK DALAM PEMERINTAHAN ACEH.....		246
A.	Komunikasi Politik Ulama-Umara	246
B.	Prinsip Komunikasi Politik Islami	247
C.	Sinergi Komunikasi Vertikal dan Horizontal	249
D.	Membangun Komunikasi Politik yang Harmonis	251
E.	Komunikasi Politik Ideal.....	252
F.	Komunikasi Politik yang Berkelanjutan	254
G.	Peran Unsur Ulama dalam Komunikasi Politik	255



BAB 12 KEMITRAAN STRATEGIS DALAM MEMBANGUN ACEH ISLAMI.....	258
A. Dinamika Komunikasi Kelembagaan.....	258
B. Transformasi Dinamika Komunikasi	259
BAB 13 KOMUNIKASI POLITIK SEBAGAI PILAR LEGITIMASI SYARIAT	263
A. Segmentasi Khalayak dalam Komunikasi Politik.....	263
B. Identifikasi Isu Strategis dan Prioritas Komunikasi.....	264
C. Peran Strategis Khutbah Jumat dalam Komunikasi Politik.....	265
D. Strategi Kolaborasi dengan Kementerian Agama.....	265
E. Prinsip-Prinsip Komunikasi Moderat dan Inspiratif.....	266
BAB 14 KOMUNIKASI POLITIK ANTARA KEKUASAAN RELIGIUS DAN EKSEKUTIF	268
A. Menguatkan Kolaborasi Lintas Instansi.....	268
B. Faktor-Faktor Pendukung Efektivitas Komunikasi.....	269
C. Dampak Positif Terhadap Partisipasi Masyarakat	271
D. Peran Ulama dalam Pembangunan Berbasis Nilai Keislaman.....	272
E. Literasi Keagamaan Masyarakat.....	273
BAB 15 KOMUNIKASI POLITIK BERBASIS SYARIAT: PERAN ULAMA DAN UMARA DI ACEH.....	275
A. Efektivitas Komunikasi Ulama	275
B. Pengalaman Empiris Masyarakat.....	276
C. Kesadaran Tupoksi sebagai Fondasi Komunikasi Politik.....	278
D. Komunikasi Politik Berbasis Data dan Dialog Terbuka.....	279
E. Saluran Komunikasi dan Transparansi Informasi.....	280
F. Peran Strategis Ulama dan Legitimasi Keagamaan.....	280
G. Koordinasi Antar-Lembaga dan Sinergi Lintas Sektor	281



BAB 16 KONSTRUKSI PESAN POLITIK ISLAMI: STRATEGI PEMERINTAH ACEH DALAM NARASI PEMBANGUNAN	283
A. Komunikasi Politik Berbasis Nilai Islam dalam Pembangunan.....	283
B. Komunikasi Politik sebagai Dakwah Kebijakan	284
C. Komunikasi Politik yang Inklusif	286
D. Arsitektur Komunikasi Politik Pemerintah Aceh	287
E. Strategi Komunikasi Empatik dan Partisipatif	288
F. Syariat Islam sebagai Nilai Hidup	289
G. Prinsip Ketuhanan.....	291
H. Prinsip Kemanusiaan	296
I. Prinsip Aklak	300
J. Prinsip Moderat.....	305
K. Prinsip Keilmuan	309
BAB 17 TIGA DIMENSI KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH....	313
A. Komunikasi Vertikal	313
B. Komunikasi Horizontal	317
C. Komunikasi Politik Non-Formal	321
BAB 18 KONTRIBUSI ORISINIL KAJIAN KOMUNIKASI POLITIK ACEH	326
A. Teori Komunikasi Politik Kontekstual Aceh	326
B. Keseriusan Pemerintah	327
C. Kerja Pemerintah <i>On the Track</i>	328
D. Ketidaksamaan Visi dan Kepentingan.....	329
E. Keterbatasan SKPA dalam Menerjemahkan Pesan Komunikasi Politik Gubernur	331
F. Hubungan Timbal Balik antara Pemerintah dan Masyarakat	333



BAB 19 KESENJANGAN KAJIAN KOMUNIKASI POLITIK DI ACEH	335
A. Strategi Komunikasi Politik Struktural.....	335
B. Strategi Komunikasi Politik Kultural	336
C. Sinergi Komunikasi Politik Pemerintah Aceh antara Ulama dan Umarah.....	338
D. Sosialisasi dan Implementasi Instruksi Gubernur	339
E. Komunikasi Kultural-Partisipatoris	340
F. Komunikasi Politik Pemerintah Vs Penutupan Bank Konvensional di Aceh	344
G. <i>Sacred Communication</i> Politik Pemerintah Aceh.....	345
BAB 20 MEMBACA ULANG KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH ACEH.....	347
A. <i>Rasional Pressure</i> Pemerintah Aceh dalam Komunikasi Politik.....	347
B. <i>The Silent Calculus</i> Pemerintah Aceh dalam Komunikasi Politik.....	348
C. Keterlibatan Ulama dalam Komunikasi Politik Pemerintah	349
BAB 21 IMPLIKASI DAN REKOMENDASI.....	351
A. Implikasi.....	351
B. Rekomendasi	352
DAFTAR PUSTAKA.....	354
PROFIL PENULIS.....	365





BAB 1

ACEH PASCA-MOU HELSINKI

A. Transformasi Politik Aceh Pasca-Perdamaian

Provinsi Aceh memiliki karakteristik dan keistimewaan yang membedakannya dari provinsi lain di Indonesia. Keunikan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh (P. Aceh 2006), yang memberikan otonomi yang signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam. Hal ini memungkinkan Aceh untuk mengembangkan berbagai sektor pembangunan sesuai dengan nilai-nilai lokal dan budaya masyarakatnya.

Sejarah panjang Aceh, yang sering disebut sebagai “Serambi Mekkah”, tidak dapat dipisahkan dari dinamika perjuangan dan konflik yang telah mewarnai hubungan antara pusat dan daerah. Konflik bersenjata yang terjadi antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia berlangsung selama hampir tiga dekade, dari tahun 1976 hingga 2005. Akhir dari konflik ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) pada tanggal 15 Agustus 2005, yang menjadi momen penting dalam sejarah Aceh (Aspinall 2009).

Setelah konflik dan tsunami 2004, terdapat perubahan paradigma dalam strategi komunikasi politik pemerintah. Pendekatan yang sebelumnya berfokus pada aspek keamanan



kini bergeser menuju pendekatan kesejahteraan, sambil tetap mengedepankan nilai-nilai Islam sebagai landasan utama (Ichwan 2011). Perubahan ini menjadi tantangan tersendiri dalam konteks komunikasi politik, karena harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan ekspektasi dari berbagai pihak, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Penerapan syariat Islam di Aceh didukung oleh landasan hukum yang kokoh melalui berbagai regulasi, antara lain: UU No. 44/1999 mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Aceh No. 8/2014 mengenai Pokok-Pokok Syariat Islam. Kerangka hukum ini menjadi acuan bagi pemerintah Aceh dalam menyampaikan kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam berbagai sektor pembangunan (Salim 2015). Berbagai institusi khusus seperti Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syar'iyah, dan Wilayatul Hisbah (polisi syariah) berfungsi sebagai alat pemerintah dalam melaksanakan dan menyampaikan implementasi syariat Islam di berbagai lapisan masyarakat.

Komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah di Aceh tidak hanya berperan sebagai sarana untuk menyampaikan kebijakan, tetapi juga sebagai alat strategis dalam membangun legitimasi dan memperkuat kohesi sosial. Dalam konteks ini, pendekatan komunikasi yang mengharmonisasikan aspirasi keagamaan masyarakat dengan kebutuhan pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Hal ini penting mengingat masyarakat Aceh memiliki keterikatan emosional yang mendalam terhadap nilai-nilai keislaman



yang telah menjadi bagian integral dari budaya lokal (Adan 2016).

Komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam mengintegrasikan agama dengan pembangunan multisektoral menunjukkan pola interaksi yang kompleks antara berbagai elemen, sebagai berikut: *pertama*, komunikasi vertikal, yang mencakup pola komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, sering melibatkan proses negosiasi dan tawar-menawar terkait alokasi sumber daya serta pelaksanaan kebijakan (Imania Fathu Zahra 2024). *Kedua*, komunikasi horizontal, di mana interaksi terjadi antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal, termasuk ulama (teungku), tokoh adat, mantan kombatan GAM, serta masyarakat sipil (M. A. Miller 2009, 2013). *Ketiga*, komunikasi diagonal, yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan aktor internasional yang memiliki kepentingan dalam aspek ekonomi, politik, atau kemanusiaan di Aceh (Syauket 2024). Dengan demikian, ketiga pola komunikasi ini saling berinteraksi dan berkontribusi dalam membentuk dinamika pembangunan di Aceh.

Setelah konflik, strategi komunikasi politik pemerintah Aceh lebih banyak mengadopsi pendekatan islamisasi kebijakan publik, di mana setiap kebijakan pembangunan multisektoral disampaikan dengan legitimasi nilai-nilai Islam untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Pendekatan ini terutama terlihat dalam sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pariwisata (Irma 2020).

Integrasi agama dalam pembangunan multisektoral memerlukan strategi komunikasi politik yang responsif dan melibatkan partisipasi. Pemerintah harus memperhatikan sensitivitas budaya, memperkuat dialog partisipatif, dan



memastikan bahwa program pembangunan sejalan dengan nilai-nilai syariah (Mujiburrahman, Sayuthi, and Nazir 2017). Integrasi nilai-nilai Islam dalam pembangunan multisektoral di Aceh dapat dilihat dalam beberapa sektor utama. Pembangunan ekonomi di Aceh menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah melalui pengembangan lembaga keuangan syariah, sistem perbankan Islam, dan koperasi syariah. Bank Aceh Syariah menjadi contoh sukses transformasi institusi keuangan konvensional menjadi institusi berbasis syariah. Komunikasi politik pemerintah di sektor ini berfokus pada penguatan narasi 'ekonomi halal' dan 'kesejahteraan berbasis syariah' (Purwanto 2018). Sektor pendidikan di Aceh menunjukkan integrasi yang kuat antara kurikulum nasional dan nilai-nilai Islam. Dayah (pesantren tradisional) mendapatkan legitimasi dan dukungan yang signifikan melalui pembentukan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah. Komunikasi politik pemerintah menekankan pentingnya 'pendidikan holistik' yang menggabungkan ilmu pengetahuan modern dan nilai-nilai Islam (Saifuddin 2022). Pengembangan pariwisata halal menjadi salah satu strategi pemerintah Aceh untuk meningkatkan perekonomian daerah. Komunikasi politik dalam sektor ini menekankan narasi pariwisata berbasis nilai-nilai Islam yang ramah terhadap wisatawan Muslim, namun tetap inklusif bagi wisatawan non-Muslim (Umuri, Farma, and Nurlina 2022). Pembangunan sektor kesehatan di Aceh mengintegrasikan pendekatan medis modern dengan nilai-nilai Islam, seperti pengembangan rumah sakit dan klinik yang menekankan pelayanan kesehatan Islami. Komunikasi politik pemerintah dalam sektor ini berfokus pada narasi 'kesehatan holistik' yang memperhatikan aspek fisik dan spiritual (Adan 2016).

Namun tantangan yang dihadapi sangat kompleks. Globalisasi, modernisasi, dan dinamika politik nasional dapat



memperkenalkan nilai-nilai baru yang mungkin bertentangan dengan identitas keagamaan lokal. Oleh karena itu, komunikasi politik pemerintah Aceh perlu menciptakan penting melihat kembali globalisasi, modernisasi, dan dinamika politik nasional. Ketidaksesuaian regulasi terdapat kemungkinan terjadinya konflik antara regulasi nasional dan qanun (peraturan daerah) Aceh, yang memerlukan pendekatan komunikasi politik yang efisien untuk menyelaraskannya (Ichwan 2011). Polarisasi masyarakat perbedaan pemahaman terhadap pelaksanaan syariat Islam dapat menyebabkan polarisasi di kalangan masyarakat, khususnya antara kelompok konservatif dan moderat (Feener 2013). Keterbatasan kapasitas dalam kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam pembangunan multisektoral menjadi tantangan yang signifikan (Syamsuri et al. 2021). Tekanan internasional pelaksanaan syariat Islam di Aceh sering kali menjadi perhatian internasional, terutama terkait isu-isu HAM dan gender, yang memerlukan strategi komunikasi politik yang peka dan efektif (Afrianty 2015; Marhaban 2014).

Kasus terkini di Aceh terkait identitas keislaman dan pengelolaan hubungan antara agama, politik, dan pembangunan memang menarik untuk dibahas. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam secara formal. Berikut adalah beberapa poin penting: *pertama*, implementasi syariat islam sejak diberlakukannya Qanun (peraturan) Syariat Islam pada 2001, Aceh telah menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti aturan berpakaian, larangan minum minuman keras, dan pelaksanaan hukuman bagi pelanggaran syariat. *Kedua*, hubungan agama dan politik identitas Islam sangat kuat mempengaruhi politik di Aceh.



Partai-partai Islam seperti Partai Aceh memiliki pengaruh signifikan. Pemimpin politik sering menggunakan retorika keislaman dalam kampanye dan kebijakan mereka. *Ketiga*, pembangunan dan kesejahteraan Pemerintah Aceh berupaya menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, pengembangan pariwisata halal, pengelolaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, dan program-program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. *Keempat*, tantangan dan kontroversi implementasi syariat Islam di Aceh tidak lepas dari tantangan dan kontroversi. Penerapan hukuman cambuk bagi pelanggaran syariat sering menuai kritik dari organisasi hak asasi manusia. Selain itu, terdapat perdebatan tentang batas-batas kewenangan pemerintah Aceh dalam menerapkan syariat Islam. *Kelima*, rekonsiliasi dan perdamaian pasca konflik panjang antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), identitas keislaman juga berperan dalam upaya rekonsiliasi dan perdamaian di Aceh. Nilai-nilai Islam digunakan sebagai landasan untuk mempersatukan masyarakat dan membangun kembali daerah ini. Pembangunan Pasca-Konflik Setelah konflik berkepanjangan, Aceh menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali infrastruktur, ekonomi, dan rekonsiliasi sosial. Upaya ini harus dilakukan secara seimbang dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan adat istiadat setempat (Abidin 2021).

Keenam, otonomi khusus sebagai bagian dari perjanjian damai dengan pemerintah pusat pada 2005, Aceh diberikan otonomi khusus. Namun, implementasinya seringkali menuai perdebatan terkait batasan kewenangan dan alokasi sumber daya. *Ketujuh*, partisipasi politik dinamika politik di Aceh diwarnai oleh kuatnya pengaruh partai-partai berbasis Islam dan isu-isu terkait penerapan syariat. Hal ini



seringkali menjadi sumber perdebatan dan polarisasi di masyarakat (Brian McNair 2018). *Kedelapan*, pengelolaan sumber daya alam Aceh kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi. Namun, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dan prinsip-prinsip agama. Secara keseluruhan, kasus Aceh menunjukkan kompleksitas dalam mengelola hubungan antara agama, politik, dan pembangunan dalam konteks identitas keislaman yang kuat. Dibutuhkan keseimbangan dan kebijakan yang arif untuk menjaga harmoni sosial, menjunjung nilai-nilai keislaman, dan mencapai kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Adan 2016).

Pemerintah Aceh bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan dan komunikasi politik sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Ini menjadi dasar utama dalam model komunikasi politik di Aceh, mengingat status khusus provinsi ini sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang secara resmi menerapkan Syariat Islam (Mujiburrahman, Sayuthi, and Nazir 2017). Komunikasi politik pemerintah Aceh harus mengedepankan nilai-nilai Islam sebagai pijakan dalam merancang strategi pembangunan di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam struktur sosial masyarakat Aceh, ulama memegang peranan penting sebagai otoritas keagamaan. Melibatkan tokoh agama dan ulama dalam penyusunan kebijakan adalah strategi komunikasi politik yang menghubungkan kepentingan pemerintah dengan aspirasi masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Saby menyatakan bahwa partisipasi ulama melalui lembaga MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) dalam pengambilan keputusan strategis memberikan legitimasi religius pada kebijakan pembangunan, sehingga



mempermudah proses sosialisasi dan pelaksanaan program pemerintah (Saby 1996).

Mekanisme komunikasi politik di Aceh sangat terkait dengan saluran-saluran keagamaan yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Khotbah Jumat, pengajian, dayah (pesantren), dan media Islam berfungsi sebagai saluran yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan. Seperti yang dijelaskan oleh Aspinall (2019), pengintegrasian pesan pembangunan dalam forum-forum keagamaan dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program pemerintah karena disampaikan dengan pendekatan budaya yang sudah dikenal. Komunikasi politik pemerintah Aceh dalam memperkenalkan program pembangunan multisektoral harus mempertimbangkan dimensi keagamaan. Integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan, program pemberdayaan ekonomi syariah, pengentasan kemiskinan melalui zakat, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan ibadah menjadi ciri khas dalam model pembangunan di Aceh. Menurut Ichwan (2022), pendekatan ini menghasilkan narasi pembangunan yang unik dan sesuai dengan identitas keislaman masyarakat Aceh.

Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan pendekatan yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan menghasilkan model komunikasi politik yang inklusif. Konsep gotong royong dalam pandangan Islam (ta'awun) menjadi landasan nilai dalam mendorong partisipasi masyarakat. Hasyim (2021) menyatakan bahwa pendekatan partisipatif yang berlandaskan nilai-nilai keislaman menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan, sehingga keberlanjutan program dapat terjamin. Dalam konteks ini, efektivitas komunikasi politik pemerintah merupakan faktor kunci



dalam keberhasilan integrasi antara agama dan pembangunan multisektoral di Aceh. Strategi komunikasi yang baik akan memperkuat dukungan masyarakat terhadap program pembangunan, meningkatkan partisipasi publik, dan mengurangi kemungkinan terjadinya resistensi atau konflik sosial. Oleh karena itu penelitian ini sangat penting untuk memahami cara pemerintah Aceh mengelola komunikasi politiknya dalam menciptakan sinergi antara agama dan pembangunan, serta tantangan dan peluang yang ada dalam proses tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana pemerintah Aceh melakukan komunikasi politik untuk mengintegrasikan agama dan pembangunan, serta bagaimana dinamika konflik memengaruhi proses tersebut, diantaranya:

1. Keunikan dan kekhususan Aceh sebagai wilayah yang berlandaskan syariat Islam adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi menerapkan syariat Islam sebagai dasar hukumnya. Hal ini menciptakan lanskap politik dan sosial yang khas, di mana agama tidak hanya menjadi aspek pribadi, tetapi juga menjadi fondasi bagi kebijakan publik dan strategi pembangunan. Penelitian mengenai bagaimana pemerintah Aceh mengkomunikasikan integrasi agama dalam pembangunan akan memberikan wawasan yang mendalam tentang adaptasi tata kelola modern dengan nilai-nilai religius yang terakar kuat. Studi ini dapat mengeksplorasi bagaimana narasi keagamaan digunakan untuk memobilisasi dukungan publik, memvalidasi kebijakan, atau bahkan menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan pembangunan, yang mungkin tidak ditemukan di wilayah lain di Indonesia atau di negara-negara sekuler.



KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN ACEH ISLAMI DAN SEJAHTERA

Di tengah warisan konflik dan aspirasi otonomi khusus, buku ini mengungkapkan bagaimana komunikasi politik pemerintah Aceh berfungsi sebagai jembatan strategis untuk mewujudkan visi Aceh sebagai wilayah Islami yang harmonis dan sejahtera. Melalui analisis mendalam terhadap Grand Design Syari'at Islam, narasi ini menyoroti sinergi antara eksekutif, legislatif, dan lembaga seperti Dinas Syari'at Islam (DSI) dalam mensosialisasikan qanun syariah, melatih aparat penegak hukum, serta membangun solidaritas spiritual masyarakat. Pendekatan komunikasi ini tidak hanya menangani tantangan pendangkalan akidah dan aliran sesat, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam sebagai ruh pembangunan tamaddun Islami yang inklusif.

Pemerintah Aceh memanfaatkan komunikasi politik untuk menerjemahkan idealisme Islam ke dalam good governance, mencakup pencegahan masalah sosial melalui qanun dan sosialisasi yang melibatkan ulama serta masyarakat. Buku ini membahas transisi dari konflik GAM ke pilkada damai 2006, di mana komunikasi elite dengan publik mengurangi segregasi politik dan memperkuat partisipasi berbasis nilai syariah. Kasus Mahkamah Syariah dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh 2006 dijadikan contoh bagaimana narasi politik membentuk etika keislaman dalam birokrasi.

Komunikasi politik ini mendorong kesejahteraan melalui politik siyasa syariah, yang menjadikan Islam sebagai kekuatan solidaritas bukan sekadar hukum formal. Namun, buku ini juga mengkritisi kesenjangan antara elite dan rakyat, serta kebutuhan koordinasi ulama dalam era kontemporer untuk menghindari stigma terorisme pasca-konflik. Visi akhirnya adalah Aceh sebagai "wa rabbun ghafur" negeri adil makmur yang diridhai Allah dibangun lewat komunikasi partisipatif yang menyatukan adat, agama, dan pembangunan.

ISBN 978-634-7431-65-3



9

786347

431851



Penamuda.com

PT Penamuda Media
Casa Siderum, Ngentak Godean
penamuda.media